HEGEMONI DI RUANG MEDIA DIGITAL : ANALISIS *FRAMING* DETIKCOM TERHADAP PEMBERITAAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR OLEH KEMENTERIAN AGRARIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk

Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.)

Dalam Bidang Ilmu Politik

Mauludetul Hasanah

NIM 10040122104

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

MEI, 2026

PERNYATAAN PERTANGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI

Bismillahirohmanirohim, yang bertanda tanggan dibawah ini, saya :

Nama	: Mauludetul Hasanah
NIM	: 10040122104
Program Studi	: Ilmu Politik
Judul	: Hegemoni Di Ruang Media Digital : Analisis *Framing* detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Selama Dua Tahun Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti sebagai karya plagiasi, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 3 Juni 2025

Mauludetul Hasanah

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh :

Nama	: Mauludetul Hasanah
Nim	: 10040122104
Program Studi	: Ilmu Politik

Berjudul " ***Hegemoni Di ruang Media Digital : Analisis Framing detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kementerian Agraria"*** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 3 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Laili Bariroh, M.Si

NIP :197711032009122002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Mauludetul Hasanah dengan judul **" Hegemoni Di ruang Media Digital : Analisis *Framing* detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kementerian Agraria "** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh tim penguji skripsi pada tanggal 18 Juni 2026.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I	Penguji II
Laili Bariroh, M.Si.	Dr.Khoirul Yahya, M.Si.
NIP 197711032009122002	NIP 197202062007101003
Penguji III	**Penguji IV**
Dr.Aniek Nurhayati,M.Si	Holilah,S.Ag.,M.Si.
NIP 196909071994032001	NIP 197610182008012008

Surabaya, 18 Juni 2026

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.

NIP 197306272000031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mauludatul Hasanah
NIM : 100 401 22104
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
E-mail address : Mauludatul.Hasanah 82@gmail. com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Hegemoni di ruang media digital : analisis framing detikcom terhadap pemberitaan penertiban tanah terlantar oleh kementerian agraria.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 juni 2026

Penulis

(Mauludatul Hasanah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Hasanah,Mauludetul, 2026 – Hegemoni Di Ruang Media Digital : Analisis *Framing* detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kementerian Agraria, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini mengkaji bagaimana media detikcom sebagai portal berita digital terbesar di Indonesia membingkai pemberitaan serta menganalis praktek hegemoni yang terjadi dalam pemberitaan kebijakan penertiban tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam periode Juli–Agustus 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana *framing* detikcom dalam pemberitan kebijakan penertiban tanah terlantar serta praktek hegemoni negara yang tercermin dalam pemberitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis. Data dikumpulkan dari 14 berita detikcom yang dipilih secara *purposive* dan dianalisis menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman dengan empat *elemen define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation* teori hegemoni untuk menginterpretasikan hasil dari *framing* tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dokumen dengan membandingkan temuan *framing* dengan dokumen resmi kebijakan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama pemberitaan detikcom bergerak dalam tiga fase yang berbeda namun berkesinambungan. Pada fase awal, *framing* detikcom membentuk *common sense* yaitu penggunakan dominasi sumber resmi pemerintah dalam berita. Pada fase puncak detikcom mulai menghadirkan narasi kritis dari pengamat dan akademisi. Namun kritik tidak menggeser legitimasi negara, sebuah mekanisme yang dalam perspektif Gramsci disebut *war of position*. Pada fase landai fokus pemberitaan bergeser dari substansi kebijakan menuju persoalan miskomunikasi pejabat, sehingga berfungsi sebagai restorasi legitimasi negara. Kedua *framing* pemberitaan detikcom secara dominan memperkuat wacana kekuasaan negara melalui empat mekanisme: legitimasi, normalisasi, pengelolaan resistensi publik dan pemulihan hegemoni. Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci, detikcom tidak berfungsi sebagai ruang diskursus publik yang netral, melainkan sebagai bagian dari aparatus hegemoni yang aktif mereproduksi persetujuan sosial *(consent)* terhadap kebijakan agraria negara melalui mekanisme *framing* yang tampak objektif namun secara ideologis bekerja untuk mempertahankan dominasi wacana kekuasaan.

Kata Kunci : *Framing* Media, Hegemoni, Tanah Terlantar, detikcom, Gramsci, Entman, Agraria, Media Digital, *Civil Society, Common sense* .

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRACT

Hasanah, Mauludetul, 2026 - Hegemony in the Digital Media Sphere: A Framing Analysis of Detikcom's News Coverage on the Regulation of Abandoned Land by the Ministry of Agrarian

This study examines how Detikcom, as one of the largest digital news portals in Indonesia, framed news coverage and reflected hegemonic practices in reporting the abandoned land confiscation policy implemented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) during the period of July–August 2025.

The purpose of this study is to identify how detikcom framed the abandoned land confiscation policy and to analyze the practices of state hegemony reflected in such coverage. This research employs a qualitative method within a critical paradigm. The data were collected from fourteen detikcom news articles selected through purposive sampling and analyzed using Robert N. Entman's framing analysis, which consists of four elements: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendations. Gramsci's theory of hegemony was then used to interpret the framing findings. To ensure data validity, document triangulation was applied by comparing the framing results with official policy documents, particularly Government Regulation Number 20 of 2021 concerning the Control of Abandoned Areas and Land.

The findings reveal that detikcom's coverage developed through three interconnected phases. In the initial phase, detikcom's framing contributed to the formation of common sense through the dominance of official government sources in news reporting. In the peak phase, Detikcom began incorporating critical perspectives from observers and academics. However, such criticism did not undermine the legitimacy of the state, reflecting a mechanism that Gramsci conceptualizes as a war of position. In the declining phase, the focus of coverage shifted from the substance of the policy to issues of miscommunication by government officials, thereby functioning as a restoration of state legitimacy.

This study concludes that detikcom's news framing predominantly reinforced state power discourse through four mechanisms: legitimization, normalization, the management of public resistance, and the restoration of hegemony. From the perspective of Gramsci's theory of hegemony, detikcom does not function as a neutral space of public discourse; rather, it operates as part of a hegemonic apparatus that actively reproduces social consent toward state agrarian policies through framing mechanisms that appear objective but ideologically serve to maintain the dominance of state power discourse.

Keywords*: Media Framing, Hegemony, Abandoned Land, detikcom, Gramsci, Entman, Agrarian Policy, Digital Media, Civil Society, Common sense*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN PERTANGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB 1 ..... **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

1. Manfaat Teoritis 7

2. Manfaat Praktis 7

E. Definisi Konseptual 8

1. Hegemoni 8

2. Media Digital 8

3. *Framing* Pemberitaan 9

3. Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Selama Dua Tahun Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN ..9

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II **12**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

KAJIAN TEORITIK **12**
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Perspektif Teoritis 21
C. Teori Hegemoni Antonio Gramsci 22
D. *Framing* Robert N. Entman 27
E. Kerangka Berpikir 29
BAB III **36**
METODE PENELITIAN **36**
A. Jenis Penelitian 36
B. Subjek dan Obyek Penelitian 36
C. Instrumen Penelitian 38
D. Teknik Pengumpulan Data 38
1. Dokumentasi 38
2. Wawancara 39
F. Teknik Analisis Data 40
1. Analisis *Framing* Model Robert Entman 41
G. Keabsahan Data 42
BAB IV **44**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **44**
A. Gambaran Umum Penelitian 44
B. Daftar Berita Penertiban tanah terlantar detikcom 47
C. Pembagian Fase Pemberitaan 49
D. Analisis *Framing* Pemberitaan Penertiban tanah terlantar detikcom .. 50
1. *Framing* Pemberitaan Fase Awal 50
2. *Framing* Pemberitaan Fase Puncak Pemberitaan 60
3.*Framing* Pemberitaan Fase Landai 69
E. Praktik Hegemoni Dalam Pemberitaan detikcom 80
BAB V **90**
PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA **94**
LAMPIRAN **101**
A. Teks Berita Penelitian 101
B. Lampiran Email Permohonan Wawancara 123

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Elemen Teks Berita 28
Tabel 3. 1 Element *Framing*..... 42
Tabel 4. 1 Daftar Berita..... 48
Tabel 4. 2 Fase Pemberitaan..... 49
Tabel 4. 3 Tabel Analisis *Framing* Berita Robert Entman 54
Tabel 4. 4 Tabel Analisis *Framing* Berita Robert Entman 58
Tabel 4. 5 Tabel Analisis *Framing* Berita Robert Entman 63

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 35
Gambar 4. 1 Logo detikcom 45

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Amanu, H. (t.t.). *Peran media massa dalam komunikasi politik di Indonesia*.

Arasta, G. M., & Sigit, R. R. (2022). Hegemoni kekuasaan dalam pemilihan wacana berita UU ITE pada website Kementrian Komunikasi dan Informasi. *Jurnal Mahardika Adiwidia, 1*(1), 58–67. https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidia.v1i1.465

Arief, N. P., & Andi. (2025). *Antonio Gramsci: Negara & hegemoni* (E. Prasetyo, Ed., Vol. 5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Atthahirah, A. (t.t.). Hegemoni media sosial: Akun informasi Instagram @Folkative. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*.

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Kebijakan Tanah Terlantar Yang Merampas Hak Prioritas Pemegang Hak detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8014260/kebijakan-tanah-telantar-yang-merampas-hak-prioritas-pemegang-hak

Adhtiawarma D, (2025, Agustus). Nusron Minta Maaf Soal Guyon Lahan Milik Negara, Klarifikasi Isu Tanah Ngangur detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8058113/nusron-minta-maaf-soal-guyon-lahan-milik-negara-klarifikasi-isu-tanah-nganggur

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Penjelasan lengkap tanah terlantar 2 tahun bakal diambil alih negara detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015207/penjelasan-lengkap-tanah-telantar-2-tahun-bakal-diambil-alih-negara

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Adhtiawarma D, (2025, Agustus). Sempat viral Nusron tegaskan SHM nganggur gak akan diambil negara detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8056870/sempat-viral-nusron-tegaskan-tanah-shm-nganggur-nggak-akan-diambil-negara

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Siap-siap! Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil negara detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8014081/siap-siap-tanah- telantar-2-tahun-bakal-diambil-negara

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil alih negara detikcom https://www.Detikcom/jogja/bisnis/d-8014190/tanah-telantar-2-tahun bakal-diambil-alih-negara

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar 2 tahun diambil negara, pemilik bisa protes detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015397/tanah-telantar-2-tahun mau-diambil-negara-pemilik-bisa-protes

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar diambil negara kalau ada bangunannya gimana? https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015085/tanah-telantar-diambil negara-kalau-ada-bangunannya-gimana

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar diambil negara, pemilik dapat kompensasi? Detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015827/tanah-telantar-diambil negara-pemilik-dapat-kompensasi

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar mau diambil negara, pengamat: Aturannya harus jelas detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

8020951/tanah-telantar-mau diambil-negara-pengamat-aturannya-harus-jelas

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Yang harus dilakukan pemilik tanah kalau tidak mau tanah diambil detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015106/yang-harus-dilakukan pemilik-kalau-nggak-mau-tanah-telantar-diambil-negara

Aulia, D. D, (2025, Agustus). Nusron pastikan tanah SHM rakyat bukan obyek tanah terlantar detikcom https://news.Detikcom/berita/d-8055798/nusron-wahid-pastikan-tanah shm-rakyat-bukan-objek-tanah-terlanta

Detikcom website traffic, ranking, analytics [October 2024] | Semrush. (t.t.).

Entman, R. M. (1993). *Framing*: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51–58.

Eriyanto. (2002). "Analisis *framing*: Konstruksi, ideologi, dan politik media" (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 224.

Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.

Fahmi, I (2020) " Omnibus Law Peta Aspirasi Publik di Media Sosial.' Drone Emprit Publication. 5 oktober 2020. https://pers.droneemprit.id/omnibus-lawpeta-aspirasi-publik-di-media-sosial/

Fitrianingsih, I., Salma, Q., Zulfikar, M., dkk. (2025). Studi komparatif bahasa jurnalistik advertorial pada media online Detikcom dan Kompas.com. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2*(2), 158–174. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.859

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.

Gramsci, A. (1971). "Selections from the prison notebooks" (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers, hlm. 323.

Gramsci, A. (1971). "Selections from the prison notebooks" (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). Dalam *Selections from the Prison Notebooks* (hlm. 323). New York: International Publishers.

Hall, S. (1980). "Encoding/decoding." Dalam S. Hall, dkk. (Eds.), *Culture, media, language* (hlm. 132). London: Hutchinson.

Hall, S. (1980). "Encoding/decoding." Dalam S. Hall, dkk. (Eds.), *Culture, media, language*. London: Hutchinson.

Hidayat, A (2025) Nusron minta maaf soal tanah nganggur, bilang cuman candaan detikcom https://www.Detikcom/bali/berita/d-8057008/nusron-minta-maaf-soal 2025 14.

Indraswari, S. A (2025) BPKN Kritik Wacana Tanah Diambil Negara Melanggar Hak Warga Negara detikcom https://www.Detikcom/properti/berita/d-8049159/bpkn-kritik-wacana tanah-telantar-diambil-negara-melanggar-hak-warga-negara

Koswara, I., & Rantona, S. (2025). *Analisis framing pemberitaan Danantara oleh media Detikcom*, no. 1.

Lears, T. J. J. (1985). The concept of cultural hegemony: Problems and possibilities. *The American Historical Review, 90*(3), 567. https://doi.org/10.2307/1860957

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis *framing* model Robert Entman tentang pemberitaan kasus korupsi bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala: Jurnal Humaniora, 21*(1), 60–67. https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042

Masduki and D'Haenens (2020) "Concentration of Media Ownership in Indonesia: A Setback for Viewpoint DiversitY*",* *International Journal of Communication*, 16 : 2239-2259.

Muslyha, A., Boer, K. M., & Universitas Mulawarman. (t.t.). *Analisis framing pemberitaan dinasti politik Jokowi pada Pemilu Tahun 2024 di media online Kompas.com dan Tempo.co periode Oktober 2023*.

Nurhayati, M. (2023). Komunikasi politik dan peran media dalam pemilihan umum. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, 1*(2). https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.2154

Pangeran, S., & Ritonga, M. U. (2024). Analisis *framing* dalam pemberitaan politik di tvonenews.com: Studi kasus pemilihan presiden 2024. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya, 1*(2), 126–139. https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i2.96

Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30. (t.t.).

Pasal 3 Ayat (1) PP No. 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa objek penertiban meliputi tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (t.t.).

Pasal 3 Ayat (1) PP No. 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa objek penertiban meliputi tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (2021).

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PP No. 20 Tahun 2021 mengatur bahwa kepala kantor pertanahan melakukan identifikasi dan penelitian terlebih dahulu sebelum menetapkan status tanah terlantar. (2021).

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PP No. 20 Tahun 2021 mengatur bahwa kepala kantor pertanahan melakukan identifikasi dan penelitian terlebih dahulu sebelum menetapkan status tanah terlantar. (2021).

Pasal 7–9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (t.t.).

Pasal 7–9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (t.t.).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30*.

Puri, D. R., Canda, E., Chairunisa, H., dkk. (2024). Analisis penggunaan diksi dan *framing* pada media massa BBC News: Teori hegemoni Gramsci. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 2*(4), 438–441. https://doi.org/10.62379/jishs.v2i4.1730

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Rahmah, C. A., & Fauzi, A. M. (t.t.). *Representasi politik identitas dalam pemberitaan kampanye Presiden 2024 pada portal berita CNN Indonesia: Analisis framing Robert Entman*.

Relasi media dan politik: Analisis framing pada media yang berafiliasi politik terhadap calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024. (t.t.). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5*(6).

Restiarum, H., Rijnanda, A. A., & Wahyuni, I. (2022). Analisis *framing* pemberitaan media online Detikcom dan Kompas.tv atas kasus kekerasan seksual di institusi KemenKop UKM RI. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi, 4*(2), 116–126. https://doi.org/10.53863/kst.v4i02.547

Shah, D. K. (2025). *Ethical compass, and reflexive agent in contemporary inquiry, 4*(1).

Siswati, E. (2018). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, 5*(1), 11–33. https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355

Tjoetra, A., & Fahrimal, Y. (2024). *Analisis framing media Detikcom dan CNN Indonesia pada pemberitaan konflik Pulau Rempang, 3*(1).

Wardani, A., Suprayitno, D., & Wahyuningratna, R. N. (2023). *Framing* pemberitaan calon presiden pada media online CNNIndonesia.com dan Kompas.com. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema, 6*(1), 54–79. https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1181

.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/